

STUDI PERUBAHAN TINGKAT KEKUMUHAN PERMUKIMAN NELAYAN DI KELURAHAN SUNGAI LIAT KECAMATAN SUNGAI LIAT KABUPATEN BANGKA

(Study on Changes in Slably Level of Fishermen's Settlements in Sungai Liat District, Bangka Regency)

Windy Fiona Viska¹, Dadan Mukhsin¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung, Bandung
Jl. Tamansari No. 1, Bandung 40116, Indonesia
E-mail: windyfviska@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan penduduk yang tinggi mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk maupun peningkatan kepadatan bangunan untuk permukiman, terjadinya peningkatan kebutuhan sarana prasarana untuk melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan kebutuhan ruang tersebut hampir disertai dengan pertumbuhan dan perkembangan permukiman kumuh di suatu kawasan. Kabupaten Bangka adalah kabupaten yang memiliki kawasan kumuh, yaitu kawasan permukiman nelayan Sungailiat yang terletak di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat. Bila dibiarkan tanpa penanganan perbaikan akan memperluas kawasan kumuh. Usaha yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah melalui pelaksanaan program penataan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan sejak dulu dengan berbagai pendekatan. Salah satu program pemerintah dalam menangani kawasan kumuh adalah menata permukiman kumuh secara ideal diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penataan dan perbaikan kualitas pada kawasan yang sangat kumuh. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perubahan tingkat kekumuhan setelah adanya penataan permukiman kumuh terhadap masyarakat nelayan Sungailiat. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menilai tingkat kekumuhan berdasarkan 29 indikator. Analisis menggunakan klasifikasi tinggi, sedang dan rendah dalam penilaian, sedangkan secara kualitatif dilakukan dengan memberikan argumentasi. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan tingkat kekumuhan yaitu kumuh sedang menjadi kumuh ringan. Rekomendasi dari studi ini adalah perlunya menindaklanjuti studi ini lebih mendalam dengan melibatkan seluruh komponen dari program penataan permukiman kumuh dan melakukan penanganan terhadap 7 indikator yang berubah.

Kata kunci: permukiman kumuh, penataan, tingkat kekumuhan

ABSTRACT

High population development results in an increase in population density and an increase in the density of buildings for settlements, an increase in the need for infrastructure to carry out activities to meet the needs of life. The increase in space requirements is almost accompanied by the growth and development of slum settlements in an area. Bangka Regency is a district that has a slum area, namely the Sungailiat fishermen settlement area located in Sungailiat Village, Sungailiat District. If it is left without improvement, it will expand the slum area. Efforts taken by the government to overcome this problem are through the implementation of a slum settlement structuring program that has been implemented since a long time ago with various approaches. One of the government programs in dealing with slum areas is arranging slum settlements ideally directed at efforts to improve welfare and low-income communities through structuring and improving the quality of areas that are very slum. This study aims to determine how much the change in the level of slums after the arrangement of the slum settlements of the Sungailiat fishing community. The method used for this research is qualitative and quantitative methods. Quantitative analysis was carried out by assessing the level of slum based on 29 indicators. The analysis uses high, medium, and low classifications in the assessment, while qualitatively it is done by providing arguments. Based on the results of the analysis, it can be concluded that there has been a change in the level of slums, namely moderate slum to mild slum. The recommendation of this study is the need to follow up this study more deeply by involving all components of the slum settlement program and handling the 7 changing indicators.

Keywords: slum settlement, arrangement, slum level



PENDAHULUAN

Penataan kawasan merupakan salah satu upaya rekayasa sosial yang diselenggarakan di suatu wilayah dan dilakukan bersamaan dengan upaya menciptakan suatu sistem yang komprehensif terkait aktivitas yang berlangsung di kawasan, dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Manfaat yang diperoleh dari penataan permukiman antara lain yaitu menambah lahan hijau di lingkungan perkotaan, mengurangi angkat penyakit yang disebabkan lingkungan yang kumuh serta meningkatkan kelayakan atau kualitas hidup manusia dan lahan yang digunakan semakin tertata sehingga memungkinkan tidak terjadi adanya pemborosan lahan.

Lingkungan kumuh tidak hanya memberikan visual yang buruk, tetapi juga memberikan kontribusi yang tidak baik bagi perkembangan fisik kota secara umum. Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kawasan Kumuh Sungailiat yaitu sarana dan prasarana yang tersedia sangat minim dan walaupun tersedia kondisinya tidak mencukupi kebutuhan karena ketersediaannya tidak sebanding dengan kebutuhannya, kurangnya fasilitas penunjang perekonomian seperti tempat pelelangan ikan dan tambatan perahu, serta ada sebagian rumah yang masih menempati bantaran sungai dengan kondisi yang tidak layak huni dimana sering terjadi banjir ketika air sungai pasang, dan banyaknya pendatang yang masuk ke kawasan ini secara ilegal menyebabkan beban sarana prasarana yang ada di kawasan ini menjadi berat. Serta adanya keterbatasan kemampuan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Melalui program penataan permukiman nelayan yang didanai dari anggaran dan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 dibangun dan dikembangkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan di Kelurahan Sungailiat. Sarana dan prasarana tersebut antara lain: fasilitas air bersih, jalan lingkungan, drainase, perbaikan dan pembangunan rumah, tambatan perahu/kapal, pasar desa, ruang terbuka hijau (RTH)/taman, tempat pelelangan ikan serta fasilitas dan utilitas lain yang mereka butuhkan berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dilakukan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

dan Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2015 – 2034 mengamanatkan beberapa kebijakan pembangunan permukiman nelayan diantaranya meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dengan cara optimalisasi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan irigasi, pembangunan sarana sanitasi komunal di lingkungan permukiman yang berbasis masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan sampah. Untuk penataan Kawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka menyediakan lahan untuk permukimannya, sedangkan pembangunan rumah dan pemenuhan sarana prasarana dibantu oleh beberapa instansi baik di tingkat provinsi maupun pusat dan masyarakat yang akan menempati.

Infrastruktur adalah semua fasilitas fisik yang sering disebut dengan pekerjaan umum (Grigg & Washington, 2003). Menurut CMAA, infrastruktur adalah semua aset berumur panjang yang dimiliki oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah maupun pusat dan utilitas yang dimiliki oleh para pengusaha. Dipilihnya kawasan ini sebagai wilayah studi dikarenakan Kawasan Permukiman Nelayan Sungailiat memiliki potensi ekonomi dan produktivitas masyarakat yang cukup tinggi didukung penyediaan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Adanya penanganan permukiman nelayan ini dikhawatirkan tidak memberikan perubahan terhadap tingkat kekumuhan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menilai adanya perubahan tingkat kekumuhan berdasarkan juknis penilaian DPU Cipta Karya dan Departemen Kesehatan Tahun 2002

Tujuan penelitian ini adalah melihat perubahan tingkat kekumuhan setelah dilakukannya penataan permukiman nelayan di Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka, engetahui seberapa besar perubahan tingkat kekumuhan sebelum dan sesudah penataan permukiman nelayan di Kelurahan Sungailiat, dan mengetahui aspek atau indikator yang mempengaruhi terjadinya perubahan tingkat kekumuhan.

LANDASAN TEORI

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak mengenal istilah kawasan kumuh, yang ada Permukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut UU Nomor 1

Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan, perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Faktor Penyebab Kawasan Permukiman

Menurut Constantinos A. Doxiadis (1970) disebutkan bahwa perkembangan perumahan permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- *Growth of density* (Pertambahan jumlah penduduk), Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.
- *Urbanization* (Urbanisasi), Kaum urbanis yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar kaeasan pusat kota (*down town*). Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota. Tumbuhnya permukiman spontan dan permukiman kumuh adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses urbanisasi (Komarrudin, 1997).

Permukiman Nelayan

Masyarakat nelayan mempunyai ciri-ciri spesifik. Sebagai komunitas yang mempunyai orientasi ke laut, corak kehidupan social ekonominya dan pranata-pranata social yang terlembagakan dengan sendirinya telah mengalami proses adaptasi ke laut. Bentuk institusi dari masyarakat nelayan dengan sendirinya berbeda dengan masyarakat petani dengan orientasinya yang ke darat (Masyhuri, 2014).

Karakteristik permukiman nelayan merupakan gambaran keadaan yan ada pada permukiman tersebut. Pada studi pengembangan penataan Kawasan permukiman nelayan kota dan desa yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya,

dijelaskan bahwa menurut keputusan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, permukiman nelayan berdasarkan karakteristiknya disimpulkan parameternya sebagai berikut (PUCK, 2001):

Tabel 1. Karakteristik Permukiman Nelayan

No.	Parameter	Karakteristik
1.	Umum	Permukiman yang terdiri atas satuan-satuan perumahan, yang memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan penghuninya.
2.	Lokasi Geografis	Berdekatan atau berbatasan langsung dengan perairan, dan memiliki akses yang tinggi terhadap Kawasan perairan.
3.	Pekerjaan penduduk	60% dari jumlah penduduk merupakan nelayan, dan pekerjaan lainnya yang terkait dengan pengolahan dan penjualan ikan.
4.	Sarana	Memiliki berbagai sarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan penduduknya sebagai nelayan, khususnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi ikan dan pengolahan ikan.
5.	Prasarana	Memiliki berbagai prasarana yang mendukung penghidupan penduduknya sebagai nelayan, khsuusnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi ikan dan pengolahan ikan.

Sumber: Studi Pengembangan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Kota dan Desa Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya,2000

METODOLOGI

Metoda pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deduktif, dimana pendekatan ini sudah ditentukan terlebih dahulu variabel penelitian. Dan metode analisis yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kuantitatif dimana metode ini melakukan penilaian dan pembobotan terhadap tingkat kekumuhan sebelum dan sesudah penataan.

HASIL ANALISIS

Analisis Tingkat Kekumuhan sebelum Penataan

Dari hasil pengolahan data, diketahui bahwa kawasan nelayan Sungailiat sebelum adanya penataan memiliki nilai score tingkat kekumuhan adalah 66,33 ini berarti termasuk ke dalam kriteria kumuh sedang yang memiliki nilai kekumuhan antara 46,8 – 70,2 sesuai dengan nilai indikator kekumuhan yaitu:

- Sangat Kumuh dengan Hasil Penilaian antara 93,6 – 117
- Kumuh Berat dengan Hasil Penilaian antara 70,2 – 93,6
- Kumuh Sedang dengan Hasil Penilaian antara 46,8 – 70,2
- Kumuh Ringan dengan Hasil Penilaian antara 23,4 – 46,8
- Tidak Kumuh dengan Hasil Penilaian antara 0 – 23,4

Dari tingkat kekumuhan di atas diketahui bahwa lokasi yang di identifikasikan sebagai kawasan permukiman kumuh nelayan di Kabupaten Bangka mempunyai tingkat kekumuhan sedang. Tingginya tingkat kekumuhan di Kawasan tersebut dipengaruhi oleh salah satunya kondisi sarana dan prasarana yang tidak layak.

Kondisi permukiman nelayan Sungailiat merupakan permukiman kelompok kumuh yang artinya pada permukiman ini perlu adanya perbaikan prasarana dan sarana yang ada, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka sudah sesuai karena permukiman tersebut perlu untuk Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan fisik Pembangunan dan penanganan infrastruktur dengan tingkat kekumuhan sedang.



Gambar 1. Kondisi Permukiman Nelayan Sungailiat Sebelum Penataan
Sumber: Survey Lapangan, 2018

Analisis Tingkat Kekumuhan sesudah Penataan

Kondisi permukiman nelayan Sungailiat setelah penataan dibangun sebuah tugu nelayan 2 yang menandakan suatu lokasi kawasan nelayan di Kelurahan Sungailiat. Selain perbaikan kondisi sarana dan prasarana lingkungan lainnya, Pemerintah Kabupaten Bangka juga sudah membangun sedikit demi sedikit sebuah RTH walaupun belum sepenuhnya selesai didekat sempadan sungai untuk memperindah tampilan visual kawasan lingkungan tersebut.



Gambar 2. RTH di Kawasan Nelayan Kelurahan Sungailiat (*Sumber : Survey Lapangan, 2018*)

Dari hasil survey dan pengolahan data, didapat bahwa kawasan nelayan Sungailiat setelah adanya penataan memiliki nilai score tingkat kekumuhan adalah 46,5 ini berarti termasuk ke dalam kriteria Kumuh Ringan yang memiliki nilai kekumuhan 23,4 – 46,8.

Analisis Perbandingan Kekumuhan sebelum dan sesudah Penataan

Hasil analisis yang telah dilakukan untuk melihat seberapa besar perubahan tingkat kekumuhan, secara umum tingkat kekumuhan nelayan Sungailiat berubah dari Kumuh Sedang

berubah menjadi Kumuh Ringan. Namun, pada kriteria kondisi berdasarkan lokasi terjadi penurunan kualitas. Secara lebih rinci akan

diuraikan perubahan antara kondisi sebelum penataan dan setelah penataan.

Tabel 2. Perbandingan Tingkat Kekumuhan sebelum dan sesudah Penataan

No.	Indikator	Sebelum Penataan		Sesudah Penataan		Tingkat Perubahan	
		Nilai Indikator	Hasil Penilaian	Nilai Indikator	Hasil Penilaian	Nilai Indikator	(%)
I. KRITERIA BERDASARKAN LOKASI							
1.	Legalitas Tanah	14,26		23,51		(9,25)	(64,86)
2.	Status Penguasaan Bangunan	52,20		15,61		36,59	70,09
3.	Frekuensi Bencana Kebakaran	2		0		2	100
4.	Frekuensi Bencana Banjir	2		1		1	50
5.	Frekuensi Bencana Tanah Longsor	0		0		0	0
JUMLAH SCORE			9,6		6,8		
II. KRITERIA BERDASARKAN KEPENDUDUKAN							
6.	Tingkat Kepadatan Penduduk	2576,29		3539,90		(963,61)	(37,40)
7.	Rata-rata anggota Rumah Tangga	2,94		3,39		(0,45)	(15,30)
8.	Jumlah KK per Rumah	1		1		0	0
9.	Tingkat Pertambahan Penduduk	6,55		3,87		2,68	40,91
10.	Angka Kematian Kasar	4,13		1,38		2,75	66,58
11.	Status Gizi Balita	3		0,94		2,06	68,66
12.	Angka Kesakitan Malaria	0,08		0		0,08	100
13.	Angka Kesakitan Diare	6,77		7,93		(1,16)	(17,13)
14.	Angka Kesakitan Demam Berdarah	0		0		0	0
15.	Angka Kesakitan ISPA	0		0		0	0
JUMLAH SCORE			6,26		6,15		
III. KRITERIA BERDASARKAN KONDISI BANGUNAN							
16.	Tingkat Kualitas Struktur Bangunan	53,12		36,98		16,14	30,38
17.	Tingkat Kepadatan Bangunan	11,10		12,77		(1,67)	(15,04)
18.	Tingkat Kesehatan dan Kenyamanan Bangunan	5,75		4,08		1,67	29,04
19.	Tingkat Penggunaan Luas Lantai	0,56		5,64		(5,08)	(907,14)
JUMLAH SCORE			15,93		11,5		
IV. KRITERIA BERDASARKAN PRASARANA DASAR							
20.	Tingkat Pelayanan Air Bersih	48,94		26,20		2,74	46,46
21.	Kondisi Sanitasi Lingkungan	14		12,91		1,09	7,78

No.	Indikator	Sebelum Penataan		Sesudah Penataan		Tingkat Perubahan	
		Nilai Indikator	Hasil Penilaian	Nilai Indikator	Hasil Penilaian	Nilai Indikator	(%)
22.	Kondisi Persampahan	78,07		25,30		52,77	67,59
23.	Kondisi Saluran Air Hujan	59,81		12,47		47,34	79,15
24.	Kondisi Jalan	45,02		5,00		40,02	88,89
25.	Ruang Terbuka	0,31		1,05		(0,74)	(238,70)
JUMLAH SCORE			31,05		19,8		
V. KRITERIA BERDASARKAN KONDISI SOSIAL EKONOMI							
26.	Tingkat Kemiskinan	21,56		15		6,56	30,42
27.	Tingkat Pendapatan	23,36		9,08		14,28	61,13
28.	Tingkat Pendidikan	19,71		13,08		6,63	33,63
29.	Tingkat Keamanan	1		0		1	100
JUMLAH SCORE			3,6		2,25		
JUMLAH TOTAL SCORE			66,33		46,5		29,89

Sumber : Hasil Analisa, 2018

Ket : Angka dalam (-) menunjukkan terjadinya penurunan kualitas

*) lihat tabel 5.2 dan tabel 5.3

- a. Kriteria Berdasarkan Lokasi. Terjadi penurunan kualitas pada kriteria ini khususnya pada indikator “legalitas tanah” dari 14,26 pada tahun 2013 menjadi 23,51 pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu :
 1. Aktivitas Penduduk. Kawasan Sungailiat merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi sehingga banyak penduduk khususnya penduduk miskin dari luar wilayah yang bermigrasi ke kawasan ini, dengan menempati tanah-tanah pemerintah ataupun ruang terbuka.
 2. Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk. Disamping aktivitas penduduk, penyebab lainnya juga disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang terlihat meningkatnya kepadatan penduduk dari 2.576,29 pada tahun 2013 menjadi 3.539,90 pada tahun 2017.
- b. Kriteria Berdasarkan Kondisi Kependudukan. Secara umum kondisi pada kriteria ini menjadi lebih baik, hanya pada indikator Tingkat Kepadatan Penduduk dan Angka Kesakitan Diare yang mempunyai kondisi lebih buruk dibanding kondisi serupa pada tahun 2013.
- c. Kriteria Berdasarkan Kondisi Bangunan. Pada kriteria ini juga terjadi peningkatan kualitas dibanding tahun 2013 berubah menjadi lebih baik. Namun pada indikator Tingkat Penggunaan Luas Lantai terjadi penurunan yang cukup tinggi sebesar 5,08% ini disebabkan oleh terbatasnya lahan yang diperuntukan bagi permukiman.
- d. Kriteria Berdasarkan Kondisi Prasarana dan Sarana. Menurut analisa yang telah dilakukan pada tabel diatas terjadi perubahan kondisi yang cukup menonjol banyak sarana dan prasarana lebih baik dibanding tahun 2013, namun pada indikator Ruang Terbuka terjadi penurunan luas kawasan.
- e. Kriteria Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi. Kondisi sosial ekonomi sejak 2013 sampai 2017 terjadi perubahan yang cukup berarti, dari hasil penilaian sebesar 3,6 pada tahun 2013 berubah menjadi 2,25 pada tahun 2017. Pada indikator ini lebih banyak terjadi perubahan yang cukup berdampak pada masyarakat khususnya sangat dirasakan oleh para nelayan.

Dari hasil survey yang dilakukan kepada masyarakat Sungailiat mereka menilai bahwa dengan adanya penataan permukiman nelayan

Sungailiat ini kehidupan mereka menjadi lebih baik dari segi sarana prasarana permukiman.

KESIMPULAN

Program penataan permukiman kumuh di kawasan nelayan Sungailiat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dinyatakan berhasil, dimana telah memberikan hasil pada perubahan tingkat kekumuhan dari kumuh sedang menjadi kumuh ringan. Hal ini mencerminkan bahwa adanya program penataan permukiman telah mengurangi tingkat kekumuhan suatu kawasan. Perubahan yang terjadi sebelum penataan sebesar 66,33% menjadi 46,5% sesudah penataan.

Adanya pengaruh yang kuat terhadap perubahan tingkat kekumuhan setelah adanya penataan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan terhadap 7 dari 29 nilai indikator tingkat kekumuhan dari sebelum penataan dan sesudah penataan dimana menunjukkan hasil negatif yang artinya mengalami penurunan kualitas. Adapun 7 indikatornya antara lain: legalitas tanah, tingkat kepadatan penduduk, rata-rata anggota rumah tangga, angka kesakitan diare, tingkat kepadatan bangunan, tingkat penggunaan luas lantai, dan ruang terbuka.

Temuan dari studi ini adalah adanya penataan permukiman kumuh sangat dirasakan oleh masyarakat nelayan Sungailiat dengan penyediaan sarana prasarana yang menunjang kelancaran aktivitas, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi kelangsungan hidup masyarakat nelayan Sungailiat, akan tetapi dengan penataan permukiman nelayan ini mereka belum terlepas dari kekumuhan, hal ini dilihat dengan tingkat kekumuhan kawasan yang masih dianggap kumuh dengan kriteria kumuh ringan. Penataan kawasan kumuh belum selamanya mendapatkan hasil yang optimal, masih dibutuhkan banyak faktor untuk bisa mengentaskan kawasan nelayan Sungailiat dari kekumuhannya.

Berdasarkan kajian ini, rekomendasi yang diusulkan mengacu pada 7 indikator yang mengalami perubahan dan memerlukan penanganan yaitu:

1. Legalitas Tanah. Pemerintah setempat harus tegas terhadap masyarakatnya dengan meminta memperlihatkan bukti atau seterfikat tanah, bahwa tanah tersebut legal kepemilikan yang berlaku (milik

pribadi). Melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Nasional yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, yang berencana membantu biaya pensertifikatan tanah warga kampung nelayan di Bangka.

2. Tingkat Kepadatan Penduduk. Pemerintah mengendalikan kawasan permukiman dan menekan pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB), memberlakukan tarif tinggi bagi para imigran, dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.
3. Rata-rata Anggota Rumah Tangga. Pemerintah perlu membatasi jumlah penduduk yang datang, agar terjadi pemerataan penduduk dalam suatu rumah tangga maksimal 5 orang anggota keluarga.
4. Angka Kesakitan Diare. Penanganan yang dilakukan pemerintah yaitu: melaksanakan tatalaksana penderita diare yang standar di sarana kesehatan melalui lima langkah tuntaskan diare (LINTAS Diare), meningkatkan tata laksana penderita diare di rumah tangga yang tepat dan benar, melaksanakan upaya kegiatan pencegahan yang efektif, melaksanakan monitoring dan evaluasi. sedangkan, penanganan yang dapat dilakukan masyarakat yaitu: untuk mencegah terjadinya dehidrasi dengan memberikan oralit osmolaritas rendah dan bila tidak tersedia berikan cairan yang ada di rumah tangga seperti air tajir, kuah sayur, dan air matang. Oralit dapat mengurangi rasa muntah dan mual.
5. Tingkat Kepadatan Bangunan. Pengendalian Tingkat Kepadatan Hunian melalui Pembangunan rumah khusus (Rusunawa). Penataan Kawasan Permukiman melalui kegiatan peremajaan dan pemugaran. Menerapkan kebijakan disentif oleh pemerintah.
6. Tingkat Penggunaan Luas Lantai. Pemberian sanksi pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah di lahan yang bukan sebagai peruntukannya. Arahan pemberian kompensasi dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten yang penataan ruangnya berdampak negative

- pada wilayahnya. Arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. Pemberian persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/Lembaga komersial.
7. Ruang Terbuka. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun. Menghijaukan bangunan (*green roof/green wall*), keterbatasan lahan untuk dapat mengembangkan kawasan hijau dapat disiasi dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan. Menyusun kebijakan hijau, pemerintah daerah serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan perda terkait dengan RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum. Memberdayakan komunitas hijau, Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan pemertaan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak, dan kelembagaan peran komunitas hijau.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. 1997. Kamus Tata Ruang. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, Ikatan Ahli Perencana Indonesia.
- Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002. Petunjuk Operasional Penilaian Tingkat Kekumuhan.
- RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030.
- Undang-undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

- CA Doxiadis. (1970). Ekistics, the science of human settlements. *JSTOR*.
- Grigg, N. S., & Washington, Y. (2003). *Water, Wastewater, and Stormwater Infrastructure Management*.
- Komarrudin. (1997). *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Yayasan REI Jakarta.
- Masyhuri. (2014). PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN MOBILITAS SOSIAL NELAYAN. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(1).
- Karya.2000. Studi Pengembangan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Kota dan Desa.